



**Arsip Nasional
Republik Indonesia**

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

**Jakarta
2015**



Pengantar Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2014 dan merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN) Tahun 2010 - 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014. Selain itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI ini juga berdasarkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan janji kinerja di Tahun 2014.

Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa indikator kinerja tertentu yang tidak tercapai.

Hasil analisis dan evaluasi Laporan Kinerja ANRI Tahun 2014 ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran dari seluruh komponen di lingkungan ANRI dan institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja di tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dan bidang kearsipan secara nasional dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia

Mustari Irawan



DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

| | | |
|--------------|--|----|
| Bab 1 | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| Bab 2 | RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA | 3 |
| | A. Rencana Strategis | 3 |
| | B. Penetapan Kinerja | 5 |
| Bab 3 | AKUNTABILITAS KINERJA | 6 |
| | A. Capaian Kinerja ANRI Tahun 2014 | 6 |
| | B. Akuntabilitas Keuangan | 23 |
| Bab 4 | PENUTUP | 24 |

Lampiran

| | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | : Penetapan Kinerja |
| Lampiran 2 | : Pengukuran/Capaian Kinerja |
| Lampiran 3 | : Implementasi SIKD-TIK |
| Lampiran 4 | : Instansi yang Telah melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan |
| Lampiran 5 | : Persetujuan JRA Tahun 2014 |
| Lampiran 6 | : Daftar Instansi Yang Menyerahkan Arsip Statis |
| Lampiran 7 | : Persetujuan Pemusnahan Arsip |
| Lampiran 8 | : Pengukuran Pencapaian sasaran |
| Lampiran 9 | : Pengukuran Kinerja Kegiatan |
| Lampiran 10 | : Pengukuran Efisiensi Kegiatan |



DAFTAR TABEL

| NO | NAMA TABEL | HALAMAN |
|-----------|---|----------------|
| 1 | Perkembangan Jumlah Instansi Yang menerapkan SIKD-TIK | 7 |
| 2 | Instansi yang Telah Mendapatkan Persetujuan JRA sampai 2014 | 9 |
| 3 | Perbandingan Penyelamatan Arsip Statis | 11 |
| 4 | Perbandingan Persetujuan Pemusnahan Arsip | 13 |
| 5 | Perbandingan Jumlah Simpul Jaringan | 16 |
| 6 | Perbandingan Evaluasi Laporan AKIP | 20 |
| 7 | Tabel Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana | 21 |



Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar Eksekutif

Semangat akan perubahan adalah hal mendasar yang melandasi dinamika dan perkembangan di lingkungan ANRI dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 - 2014. Hal ini diikuti dengan adanya perubahan struktur organisasi ANRI guna mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2014 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis ANRI yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Adapun capaian kinerja ANRI tahun 2014 adalah sebesar 108% dengan perhitungan bahwa sebanyak 8 indikator capaian kategori "baik". Pada tahun 2014, dari 8 (delapan) indikator yang ada di ANRI, seluruh kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 0 sampai dengan 1.

Keberhasilan dalam pembinaan kearsipan nasional sangat ditentukan oleh semangat memegang teguh komitmen, keterlibatan semua pihak serta dukungan dari segenap unsur baik pemerintah pusat maupun daerah,

BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan seluruh masyarakat kearsipan.

Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar **Rp.103.911.372.237,-** (seratus tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 88.78% dari pagu anggaran sebesar **Rp.117.043.549.000,-** (seratus tujuh belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),

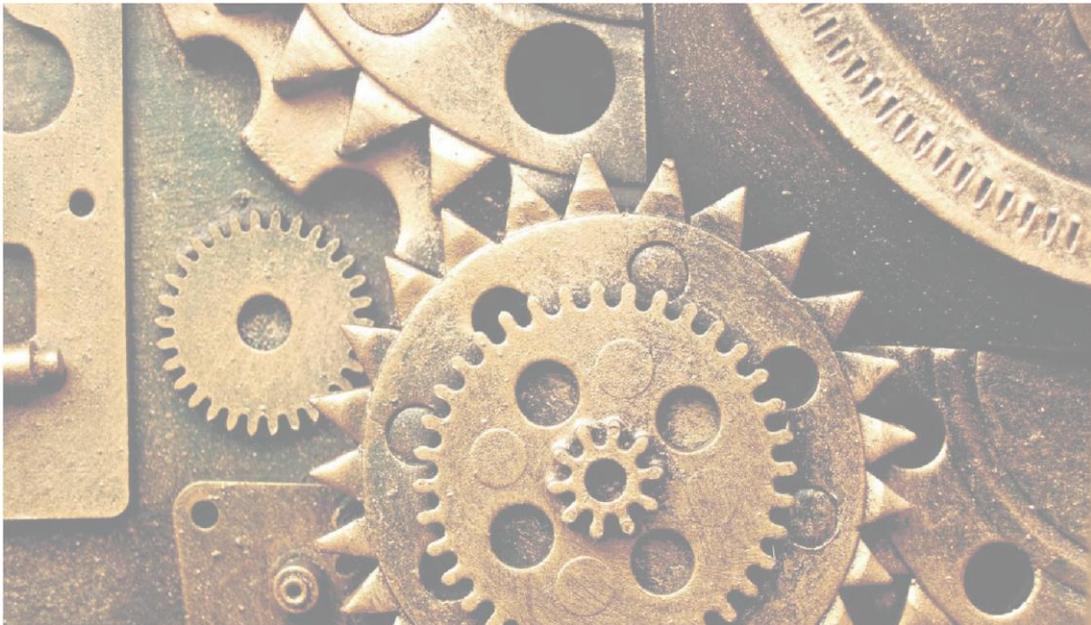
Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran Tahun 2013 terdapat peningkatan penyerapan anggaran dimana pada Tahun 2013 penyerapan anggaran sebesar **81.19%**, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penyerapan anggaran sebesar **88.78%**. Terkait penyerapan anggaran pada tahun 2014 sebesar 88.78% disebabkan oleh:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari perjalanan dinas antara lain karena adanya perbedaan tiket perjalanan keluar negeri;
2. Tidak terpenuhinya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Sisa anggaran pada belanja gaji sehingga berakibat anggaran

tersebut dikembalikan kepada kas negara.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh ANRI antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*.
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi kearsipan.
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional,
5. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.





A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan merupakan pilar utama dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Oleh karena itu penyelenggaraan kearsipan secara baik dan benar harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Dalam sudut pandang hubungan antara lembaga negara disatu sisi, dengan publik di sisi lain, tertib arsip dibangun untuk menciptakan dan menambahkan nilai arsip pada kehidupan publik (*public value*). Dalam setiap hubungan yang melibatkan kedua belah pihak ini (*social transactions*), akan selalu disertai oleh terciptanya arsip yang merekam peristiwa/kejadian dari setiap aspek, diantaranya: aspek *informasional, sosial, politik, ekonomi, legal*, ataupun *kultural*. Tertib arsip terutama juga untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dalam aspek-aspek tersebut terlindungi. Arsip, lebih dari sekedar persoalan informasi dan

legal, karena arsip terlibat dan sekaligus produk hubungan sosial. Nilai yang terkandung dalam arsip, yang paling penting bagi publik terletak pada karakter, yaitu sebagai sumber pengetahuan. Arsip sebagai sumber pengetahuanlah yang akan membuat manusia sanggup untuk melanjutkan peradabannya. Maka yang sangat penting adalah memastikan bahwa negara dan publik mempraktikkan penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Perka ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti amanah tersebut, maka ANRI harus melaksanakan tugas kearsipan secara penuh tanggung jawab, efektif dan efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Selanjutnya, Peraturan Presiden tersebut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ANRI, sebagai unsur penyelenggara negara ANRI wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja ANRI Tahun 2014. Capaian kinerja ini merupakan perbandingan dengan target yang akan dicapai yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi

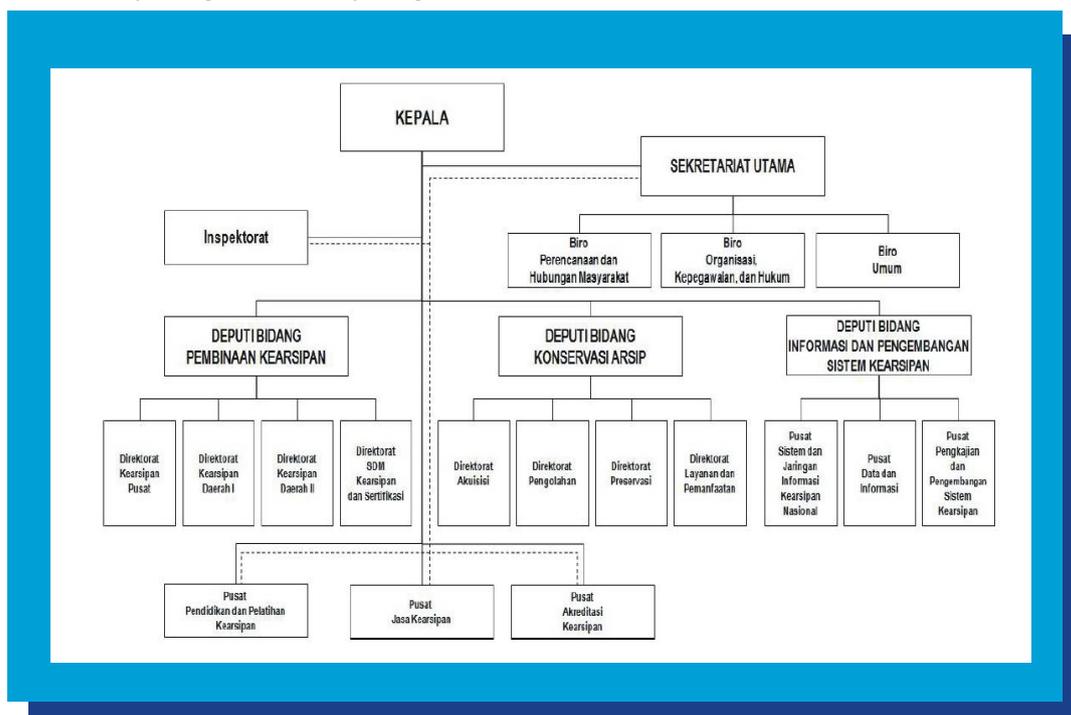
secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Tugas pokok ANRI adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana tugas dan fungsi kearsipan semakin bertambah, mengharuskan penambahan fungsi-fungsi di tubuh ANRI. Meski demikian seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, ANRI telah melakukan perampingan di beberapa unit substansi yang selama ini masih terdapat eselon IV pada unit substansi menjadi tidak ada.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Perka ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ANRI selanjutnya menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dengan bagan sebagai berikut:





RENCANA STRATEGIS

dan PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

ANRI dalam melaksanakan tugas pembinaan kearsipan baik di pusat maupun di daerah dijiwai oleh semangat untuk melakukan reformasi di bidang kearsipan. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan sebagaimana dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung



tercapainya prioritas bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, khususnya pada Fokus Prioritas VI yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Berkaitan dengan pencapaian target RPJMN tahun 2010-2014, ditetapkan fokus prioritas pembangunan jangka menengah Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014 adalah **mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi**. Sejalan dengan hal itu, dalam upaya mewujudkan tercapainya fokus prioritas tersebut serta

dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, peranan ANRI terlihat sangat nyata khususnya dalam pengembangan sistem ketatalaksanaan yang diwujudkan dalam pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government). Dengan demikian ANRI harus memiliki visi dan misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan dalam tujuan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis strategis. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi dan misi ANRI **“Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”**, yang mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip juga tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ANRI menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- 2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- 4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

- Indonesia; dan
- 5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi ANRI, maka ditetapkanlah tujuan strategis pembangunan kearsipan.



B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

ANRI pada tahun 2014 telah menetapkan Penetapan Kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:



meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;



sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja ANRI selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.





AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2014

Pencapaian kinerja ANRI dilakukan dengan melakukan pengukuran yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI Tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja ANRI tahun 2014 sebesar 107% dengan perhitungan bahwa dari 8 (delapan) indikator

kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator dengan capaian kategori “Baik”, walaupun demikian terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penghematan anggaran.

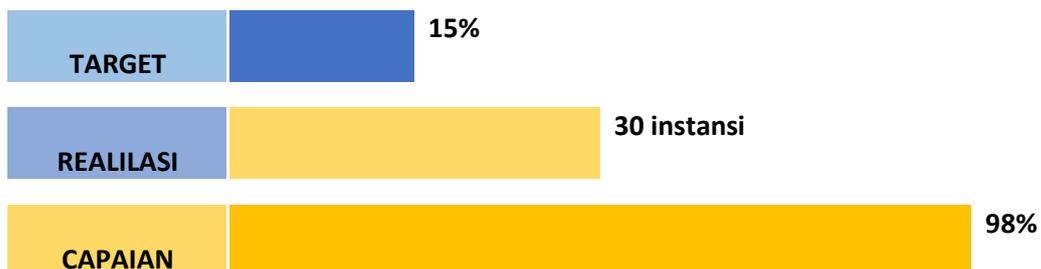
Adapun capaian kinerja ANRI Tahun 2014 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.



Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya
 Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif

Sasaran strategis ini ditempuh dengan indikator kinerja:

1. **Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis.**



Pengelolaan arsip (*archival management*) yang baik pada tingkat pencipta arsip di lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan Perguruan Tinggi Negeri adalah fondasi bagi Sistem Kearsipan Nasional.

Terkait dengan indikator ini, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu perlu dilaksanakan sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan

teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) pada 15 (lima belas) instansi pusat, serta di 15 (lima belas) provinsi pemerintah daerah. Berikut kami sampaikan Tabel perkembangan Jumlah Instansi Yang Menerapkan SIKD-TIK tahun 2012 – 2014.

Tabel 1
Tabel perkembangan Jumlah Instansi Yang Menerapkan SIKD-TIK

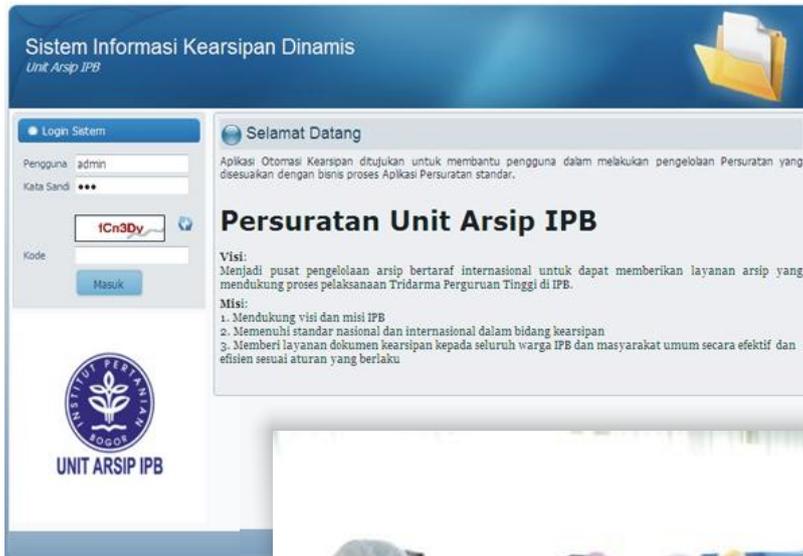
| Instansi | Jumlah | Tahun | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | sd 2012 | % | 2013 | sd 2013 | % | 2014 | Sd 2014 | % |
| Pusat: | 420 | 44 | 11.2 | 27 | 71 | 16.9 | 15 | 86 | 3.6 |
| Kementerian/ Lembaga | 87 | 23 | 29.8 | 34 | 34 | 39.1 | 15 | 49 | 17.2 |
| PTN | 193 | 10 | 5.2 | 18 | 18 | 9.3 | 0 | 18 | 0 |
| BUMN | 140 | 11 | 7.8 | 19 | 19 | 13.6 | 0 | 19 | 0 |
| Daerah: | 541 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3.1 | 15 | 42 | 2.8 |
| Provinsi | 33 | 0 | 0 | 17 | 17 | 51.5 | 15 | 32 | 45.5 |
| Kab/Kota | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 961 | 47 | 4.9 | 104 | 104 | 10.4 | 30 | 246 | 11.86 |

Berdasarkan tabel diatas, apabila diambil rata-rata maka prosentase instansi yang telah menerapkan SIKD sampai dengan tahun 2014 sebesar 11.86%. Hal ini berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, termasuk telah dilakukan implementasi SIKD-TIK sebagai tindak lanjut dari pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan ANRI dengan melakukan komunikasi yang intensif pada

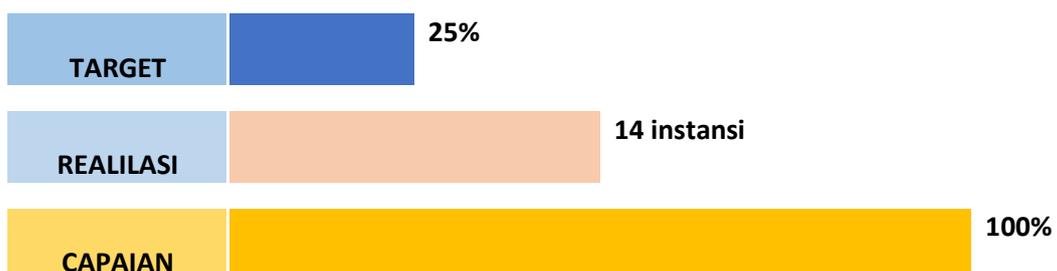
Universitas Udayana dan Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian pada indikator ini, pada tahun 2014 ANRI telah melebihi target yang semula ditetapkan yaitu dari 30 instansi menjadi 32 instansi atau sebesar 103%. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi ANRI (khususnya Kedeputan Bidang Pembinaan Kearsipan). Implementasi SIKD-TIK Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pada 2014 pelaksanaan Implementasi SIKS berbasis TIK pada lembaga kearsipan pusat yaitu pada Lembaga

Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) tidak dilaksanakan dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.



2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.



Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip adalah instrumen kearsipan yang merupakan *elemen dasar dari sebuah sistem dan manajemen kearsipan* pada pencipta arsip. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan pada bidang instrumen kearsipan ini bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi sistem dan manajemen kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Pada Tahun 2014, program ini diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi serta supervisi penerapan peraturan bidang kearsipan pada pengelolaan arsip pada 14 (empat belas) instansi. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya *standar praktik kearsipan* yang dipenuhi dari penyusunan dan penerapan instrumen kearsipan tersebut

dalam sistem kearsipan instansi. Setelah dilaksanakan supervisi penyelenggaraan kearsipan nasional pada lembaga negara (Kementerian/Lembaga), instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan sebanyak 14 (empat belas) instansi atau tercapai sebesar 94 % dari 15 (lima belas) instansi yang ditargetkan. Instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai peraturan di bidang kearsipan terdapat pada lampiran 4.

Pada tahun 2014 telah diberikan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada 52 instansi dengan jumlah JRA berdasarkan jenis informasi sebanyak 59 jenis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5.

Tabel 2
Instansi yang Telah mendapatkan Persetujuan JRA sampai dengan Tahun 2014

| INSTANSI | JUMLAH | PERSETUJUAN JRA | | |
|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | Tahun 2013 (Jumlah instansi) | Tahun 2014 (Jumlah instansi) | % |
| Pusat: | 420 | 131 | 21 | 36,16 |
| Kementerian/Lembaga | 87 | 71 | 19 | 95.40 |
| Perguruan Tinggi | 193 | 20 | 2 | 10.88 |
| BUMN | 140 | 40 | - | 34,29 |
| Daerah: | 541 | 401 | 31 | 80.04 |
| Provinsi | 33 | 33 | 4 | 100 |
| Kabupaten/Kota | 508 | 369 | 27 | 77.95 |
| Total | 961 | 533 | 52 | 60.56 |



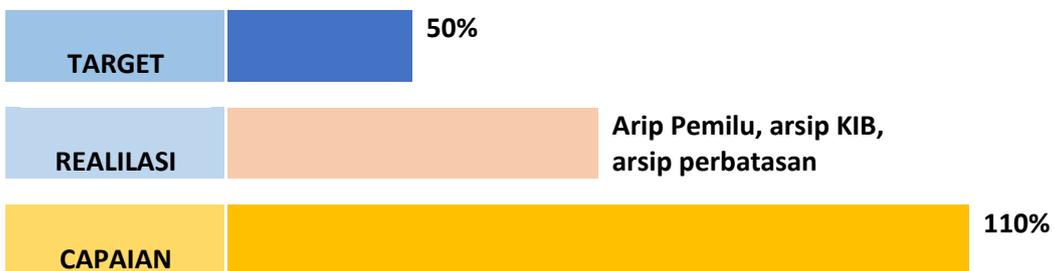
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya

Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik

Dalam mencapai sasaran ini, ANRI mencapainya dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis,

dan pemberian usul rekomendasi pemusnahan arsip.

1. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan.



Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, *outcome* dari Sistem Kearsipan Nasional (SKN) selain akan dicapai dengan pembinaan terhadap penerapan pengelolaan arsip (*archival management*) sesuai dengan peraturan kearsipan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia, juga akan dicapai melalui penyelamatan (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip. Untuk memenuhi tujuan ini, ANRI menjalankan kegiatan penyelamatan arsip statis lembaga negara. Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penelusuran, pendataan, penilaian, dan

penarikan arsip (akuisisi arsip) instansi pemerintah baik yang ada di dalam maupun luar negeri serta untuk menambah kekayaan akan arsip statis juga dilakukan wawancara terhadap tokoh nasional/pelaku sejarah. Pada Tahun 2014, ANRI menyelamatkan arsip lembaga negara berupa arsip pemilu, arsip Kabinet Indonesia Bersatu serta arsip Perbatasan. Total arsip statis lembaga negara yang diserahkan dalam tahun 2014 sebanyak 1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat dari 27 instansi. Target yang akan dicapai sebesar 50% dari 49 instansi, sedangkan realisasi 27 instansi sehingga pencapaian melebihi target yaitu 55%. Jadi, realisasi keseluruhan penyelamatan arsip statis lembaga negara tercapai sebesar 110%. Rincian penyelamatan arsip yang dilakukan oleh ANRI tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Disamping melakukan penyelamatan arsip lembaga negara, juga melaksanakan penyelamatan arsip perusahaan,

arsip ormas/orpol, dan arsip perseorangan.

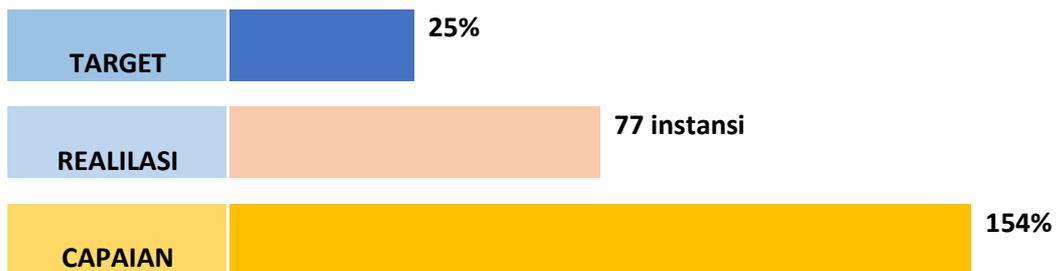
Tabel 3
Perbandingan Penyelamatan Arsip
Tahun 2013 dan 2014

| NO | JENIS ARSIP | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 |
|----|---------------------------------|--|--|
| 1 | Arsip Pemilu | 652 boks, 13 berkas/bundel, 35 CD | Penilaian, pendataan arsip |
| 2 | Arsip Kabinet Indonesia Bersatu | 494 boks, 3.306 lembar peta dan 14 lembar foto | 27 instansi: (1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat) |
| 3 | Arsip Perbatasan | - | 235 arsip kartografi (dalam bentuk softcopy); |





2. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun



Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemusnahan arsip bukanlah kebijakan yang melawan sasaran strategis penyelamatan arsip tetapi justru adalah kebijakan untuk menciptakan ruang bagi penyelamatan arsip. Pemusnahan arsip akan menjamin khasanah tetap terdiri atas arsip-arsip yang memiliki nilai berkelanjutan oleh karena kebijakan dalam koleksi arsip akan terus menyeleksi arsip untuk disimpan atau dimusnahkan secara terprogram. Tahun 2014, pada indikator ini ANRI menargetkan 25% instansi yang mendapatkan persetujuan pemusnahan

arsip. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemusnahan arsip bukanlah kebijakan yang melawan sasaran strategis penyelamatan arsip tetapi justru adalah kebijakan untuk menciptakan ruang bagi penyelamatan arsip. Pemusnahan arsip akan menjamin khasanah tetap terdiri atas arsip-arsip yang memiliki nilai berkelanjutan oleh karena kebijakan dalam koleksi arsip akan terus menyeleksi arsip untuk disimpan atau dimusnahkan secara terprogram. Pada tahun 2014 telah diberikan persetujuan pemusnahan arsip kepada

77 (tujuh puluh tujuh) lembaga negara/badan pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah. Sedangkan target yang direncanakan sebanyak 50

instansi, sehingga diperoleh prosentase realisasi sebanyak 154%.

Tabel 4
Perbandingan Persetujuan Pemusnahan Arsip
Tahun 2013 dan 2014

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Persetujuan Pemusnahan Arsip | 31 instansi | 77 Instansi |



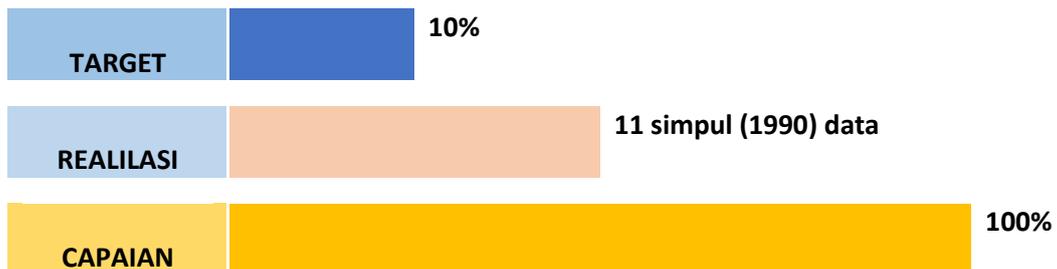


Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu

Terwujudnya hasil kajian yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan

Dalam mencapai sasaran ini, ANRI mencapainya dengan melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan NSPK Kearsipan, pengkajian dan pengembangan sistem dan jaringan informasi kearsipan serta menyelenggarakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Dari keseluruhan kegiatan ini ANRI menargetkan 10% dari data informasi

arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah *terupload* dalam JIKN.



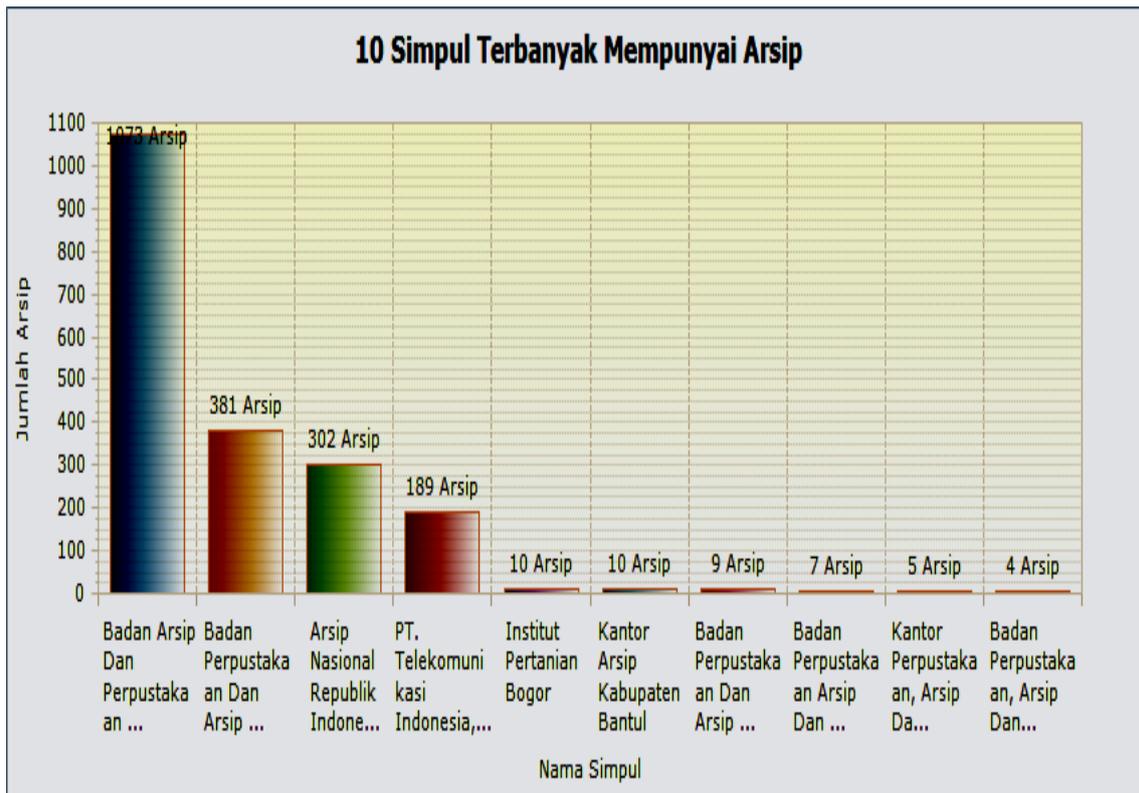
Dalam kegiatan pengkajian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan NSPK, ANRI telah menyusun sebanyak 5 (lima) NSPK yaitu: Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Tahap III, Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Tahap II, Pedoman Retensi Arsip Sektor Polhukam Tahap II, Pedoman Autentikasi Arsip Statis, Pedoman pengelolaan Arsip Terjaga serta terbitnya Jurnal Kearsipan volume 9 (sembilan) dengan 7 (tujuh) artikel yang bertajuk: Menjadikan ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Kelas Dunia Melalui Kinerja Pengelolaan Arsip Statis; Peluang Arsiparis menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Konteks, Konteks, Konteks!. Aspek Fundamental dalam Proses Pengelolaan Arsip Foto; Postmodernisme dalam Kearsipan; Skandal Donner (1900–1902): Sebuah Gerakan Politik Arsip; Akses terhadap Arsip Statis Kategori Tertutup: Studi Terhadap Arsip Peristiwa G30S/PKI yang Tersimpan di ANRI; Desain Bahan Ajar Cetak Berbasis Praktik Kualifikasi Program Diploma pada Perguruan Tinggi Jarak Jauh: Studi Kasus Desain Modul Berbasis Praktik pada Prodi Diploma IV Kearsipan.

Sedangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan jaringan informasi kearsipan telah dihasilkan NSPK sebanyak 2 (dua) NSPK yaitu: Petunjuk

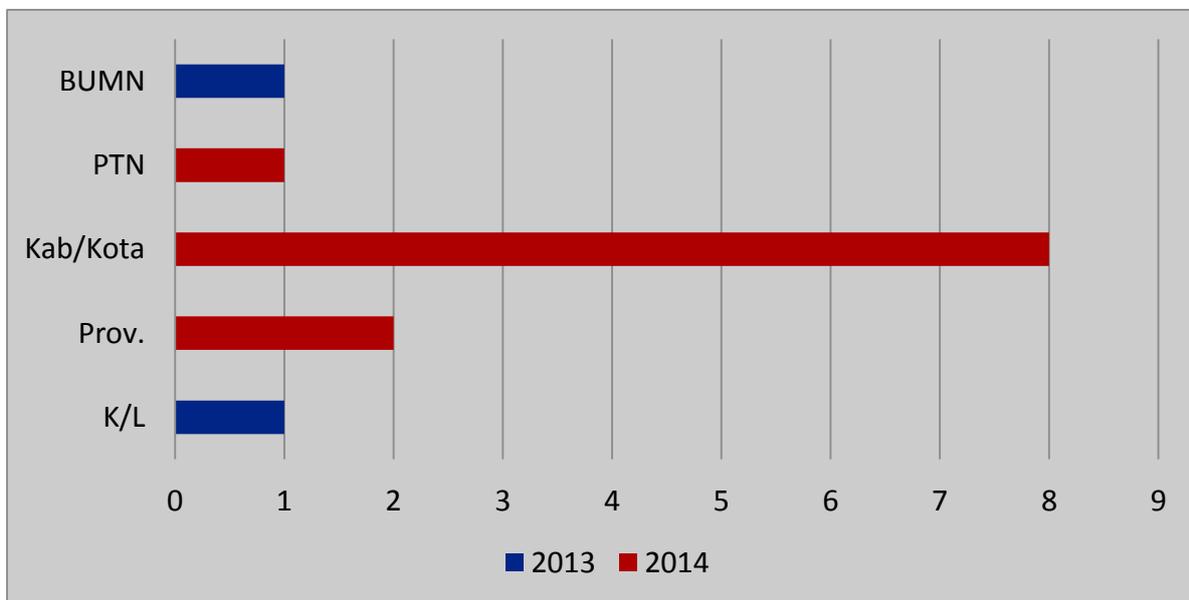
Teknis Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Simpul Jaringan, serta Pedoman Alih Daya Penyimpan Arsip berbasis *Cloud*. Disamping itu juga dilakukan: pengelolaan data informasi untuk penyelenggaraan SIKN dan JIKN, pengelolaan website JIKN, Rapat koordinasi Nasional SIKN dan JIKN, sosialisasi SIKN dan JIKN, Implementasi SIKN dan JIKN, pemeliharaan aplikasi SIKN di pusat Jaringan, serta penyusunan kerangka kerja infrastruktur SIKN. Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara nasional, Kepala ANRI telah mengeluarkan surat Nomor IK.00.03/1839A/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Berdasarkan surat tersebut, seluruh pencipta arsip dan lembaga kearsipan dapat menyelenggarakan SIKN dan JIKN. Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2014, lembaga kearsipan dan lembaga lainnya yang menjadi simpul jaringan menjadi sebanyak 11 (sebelas) simpul. Ke 11 (sebelas) simpul tersebut adalah:

Badan Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Unit Arsip IPB, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Aceh, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Banyuasin, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik Pemerintah Kota Cimahi, Kantor Arsip Kabupaten Bantul, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar. Adapun data arsip dinamis dan arsip statis yang *terupload* dalam Jaringan JIKN sebesar 1990 data, dengan rincian jumlah arsip statis yang *terupload* di JIKN sebanyak 1088 arsip dan jumlah arsip dinamis yang *terupload* di JIKN sebanyak 902 arsip. Realisasi sebesar 1990 data yang *terupload* dalam JIKN merupakan pencapaian 100% dari yang ditargetkan. Data arsip statis dan arsip dinamis sebesar 1990 tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:



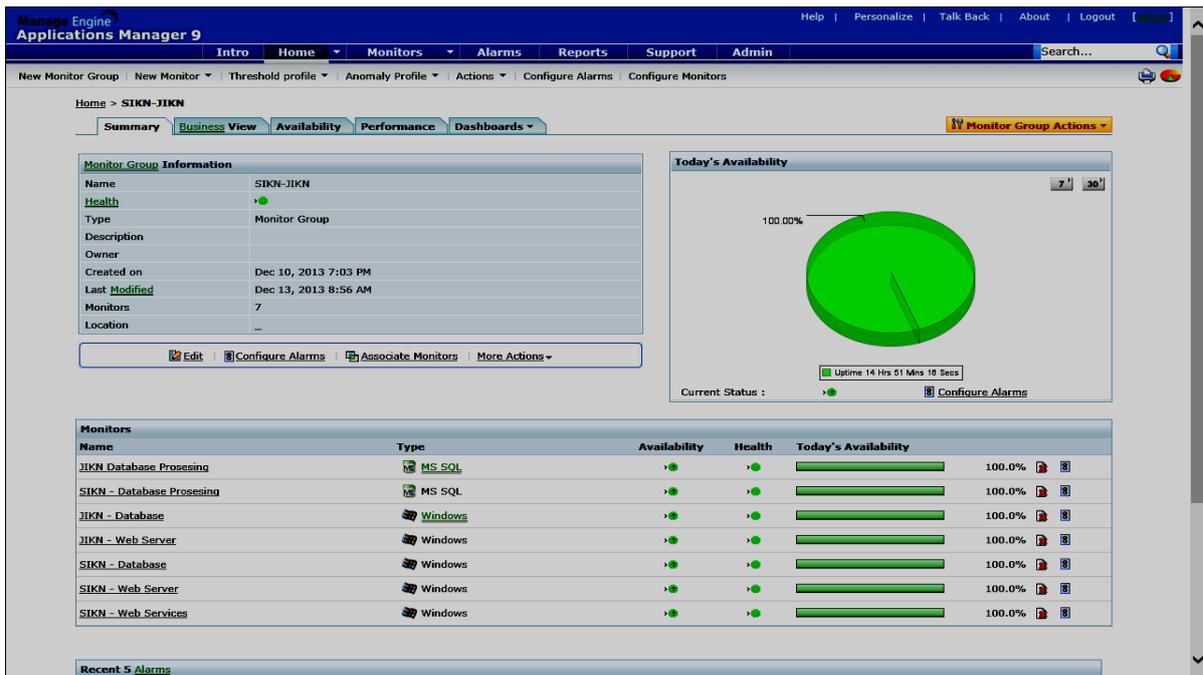
Tabel 5

Perbandingan Jumlah Simpul Jaringan Tahun 2013 dan 2014

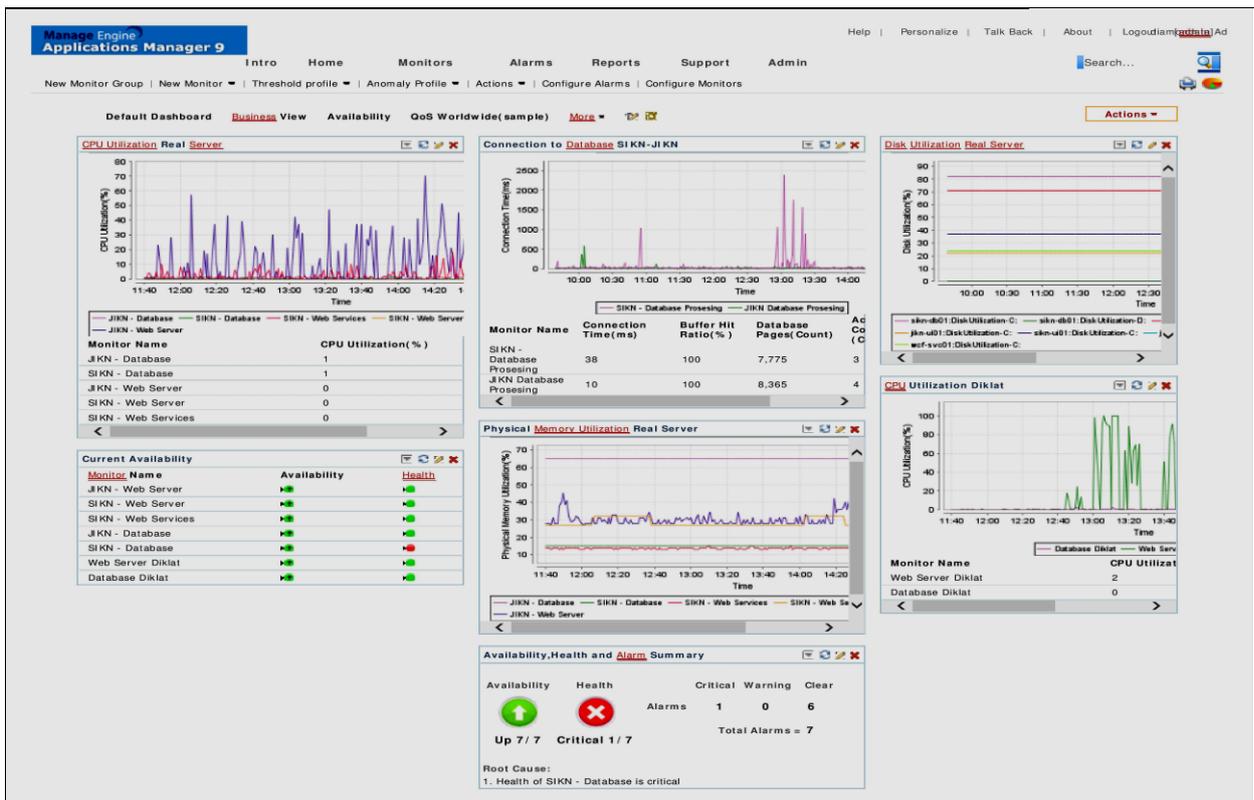


Berikut kami sampaikan gambar beberapa Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau

kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.



Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional



Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional

Availability and Health History Report for SIKN-JIKN – Today

| | |
|---------------|----------------------|
| Legend | |
| | Monitor Group |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Start date/time | End date/time |
| 27-11-14, 00:00 | 27-11-14, 15:46 |

| Monitor Group | Outages | | Warning/Critical | | From | To | Monitor | Message |
|---------------------|--------------|-------|------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|--|
| | Duration | Count | Duration | Count | | | | |
| SIKN-JIKN | | | 00 : 01 : 12 | 1 | 27/11/14 03:18 | 27/11/14 03:19 | SIKN - Database | Health of SIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error]. |
| | | | 00 : 01 : 03 | 1 | 27/11/14 03:12 | 27/11/14 03:13 | JIKN - Database | Health of JIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error]. |
| | | | 00 : 01 : 03 | 1 | 27/11/14 02:22 | 27/11/14 02:23 | SIKN - Web Services | Health of SIKN - Web Services is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error]. |
| | | | 00 : 01 : 03 | 1 | 27/11/14 03:17 | 27/11/14 03:18 | SIKN - Database | Health of SIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error]. |
| | | | 00 : 01 : 03 | 1 | 27/11/14 03:12 | 27/11/14 03:13 | JIKN - Database | Health of JIKN - Database is critical. Root Cause : 1. Events Matched With Rule:[Any Application error]. |
| Total for SIKN-JIKN | 00 : 00 : 00 | 0 | 00 : 05 : 24 | 5 | - | - | - | Availability 100.0 % |

Contoh Fitur pada aplikasi Application Manager 9 yang digunakan dalam memantau kinerja sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional

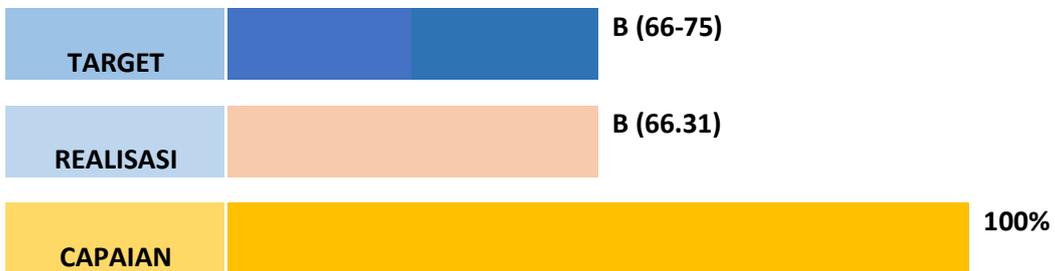


Mewujudkan birokrasi yang moderen di ANRI

Terwujudnya peningkatan utu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel

Pada sasaran strategis ini, tercermin pada 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI



Sebagai kewajiban bagi setiap lembaga dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya, ANRI juga melakukan penyusunan LAKIP yang akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, ANRI pada Tahun 2014 telah menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2013 dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Kepala ANRI Nomor: PR.04.03/393/2014 tanggal 13 Maret 2014.

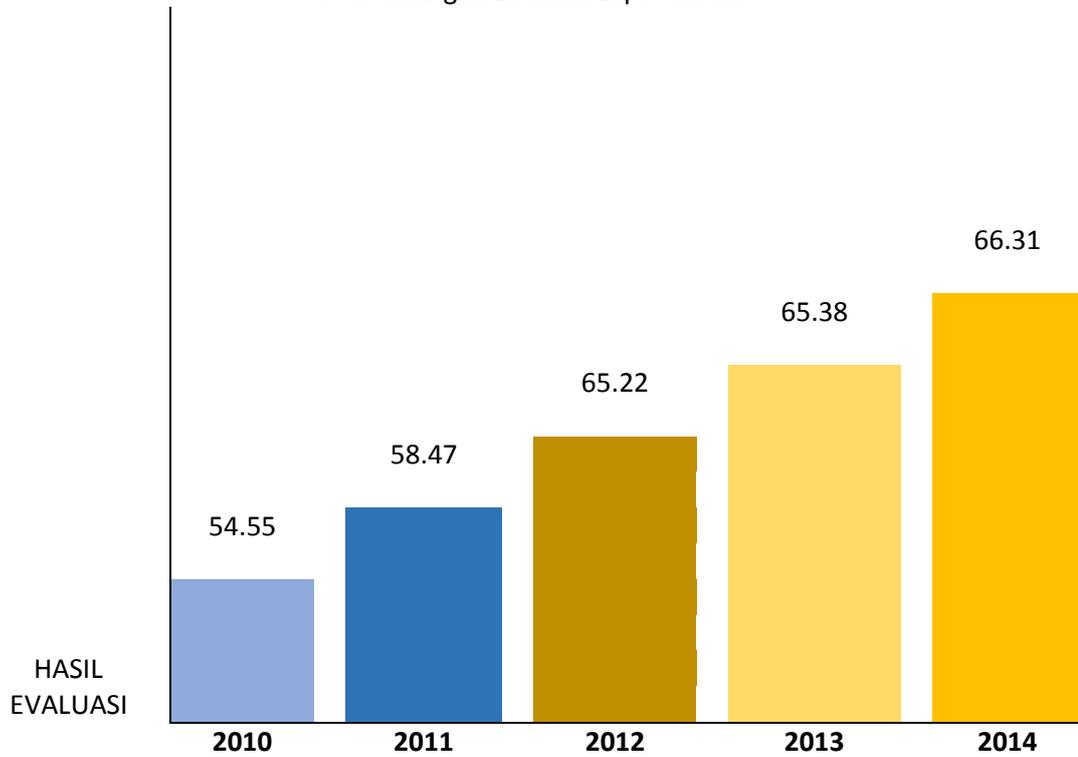
Berdasarkan surat Menteri Negara PAN dan RB nomor : B/2957/M.PAN-RB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ANRI

memperoleh nilai **66.31** atau dengan predikat penilaian “**B**” dengan rincian sebagai berikut :

| NO | Komponen Yang dinilai | Bobot | Nilai 2014 |
|----|--------------------------------------|-------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 35 | 22.23 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 20 | 12.87 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10.80 |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 | 6.54 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 13.87 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 66.31 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B |

Sebagai gambaran nilai AKIP ANRI, berikut kami sampaikan perbandingan nilai AKIP dari tahun 2010 – 2014.

Tabel 6
Perbandingan Evaluasi Laporan AKIP



1. *Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan*



Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pada Tahun 2014 ANRI mendapatkan **opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)** dari BPK. Dapat kami sampaikan bahwa dari tahun 2008 secara berturut-turut

sampai dengan tahun 2012, berdasarkan audit dari BPK atas laporan keuangan, ANRI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip

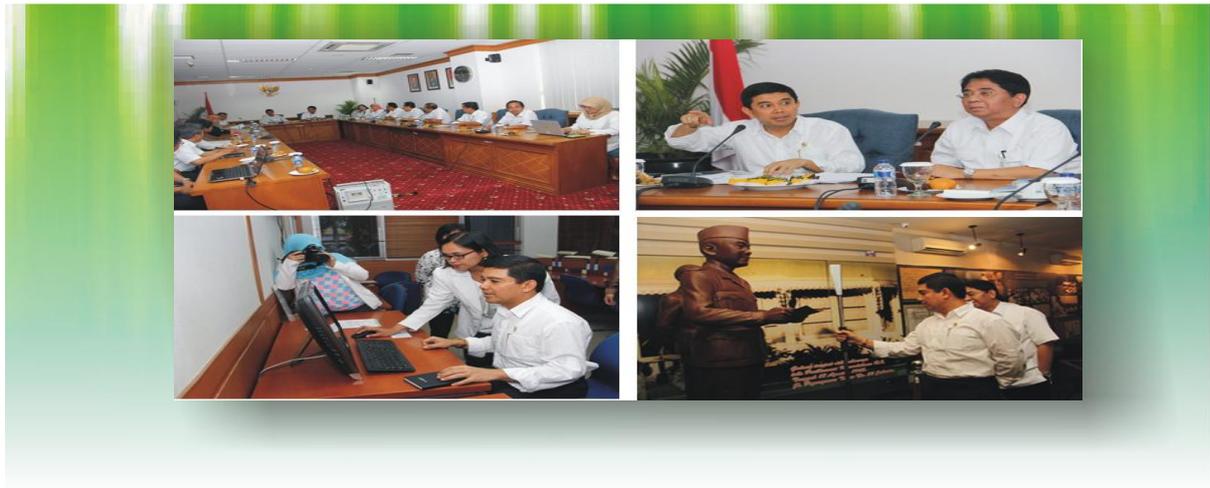


Pada indikator ini, dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung kemudahan dalam layanan arsip telah dilakukan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan ANRI. Adapun pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kearsipan yang telah dilakukan antara lain adalah: terciptanya interkoneksi jaringan di ANRI, Pusdiklat serta terehabilitasinya

sistem dan jaringan, tersedianya peralatan pengolah data yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa peralatan dan mesin yang memadai di lingkungan ANRI serta terciptanya ruang sekat pegawai untuk kenyamanan dalam bekerja. Berikut kami sampaikan persentase perbandingan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung layanan arsip.

Tabel 7
Perbandingan Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2013 dan 2014

| KATEGORI | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 |
|---|------------|------------|
| Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 90% | 100% |



KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

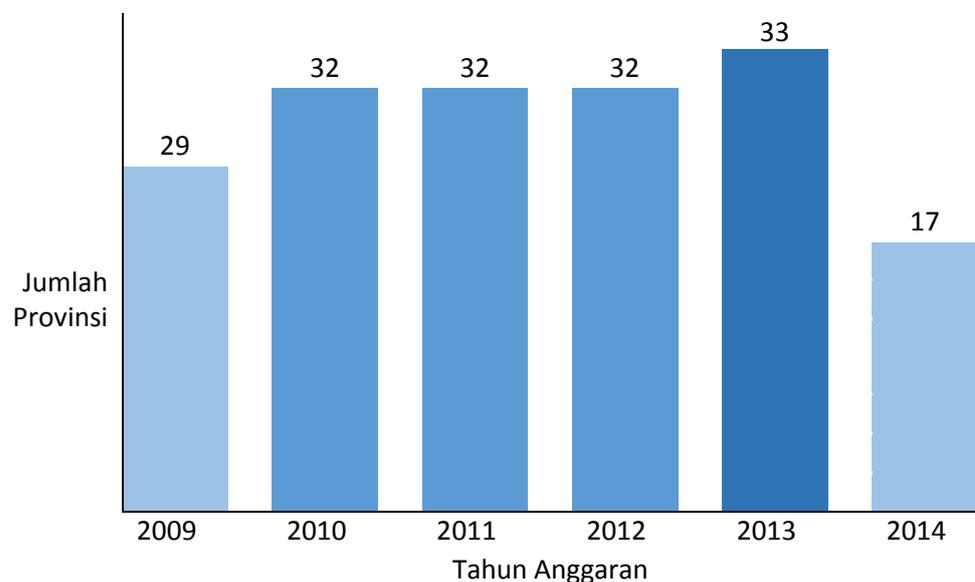
ANRI, disamping melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti telah disebutkan diatas, juga melaporkan kegiatan yang terkait pemberian dana dekonsentrasi ke provinsi yang digunakan untuk peningkatan kemampuan dalam mengelola arsip dengan mengadakan diklat.

Dalam rangka pelaksanaan **“Program Arsip Masuk Desa (AMD)”** yang dicanangkan oleh Presiden RI pada Tahun 2009, ANRI merencanakan penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretraris Desa. Diklat tersebut diselenggarakan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Pada Tahun 2014 ditargetkan akan dilaksanakan diklat teknis kearsipan melalui

dana dekonsentrasi bagi 17 (tujuh belas) provinsi di Indonesia. Ke-17 (tujuh belas) provinsi tersebut adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan selatana, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Barat dan sulawesi Barat.

Realisasi pelaksanaan dari kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi ini telah terlaksana pada 17 (tujuh belas) provinsi atau tercapai 100%. Berikut kami sampaikan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi:



B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Pagu anggaran ANRI tahun 2014 sebesar Rp. **Rp.117.043.549.000,-** (seratus tujuh belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi sebesar. **Rp.103.911.372.237,-** (seratus tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluhb dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar **88,78%** dengan rincian per program sebagai berikut:

Realisasi anggaran dan realisasi anggaran per sasaran terkait pencapaian indikator kinerja terdapat pada Lampiran 8.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran Tahun 2013 terdapat

peningkatan penyerapan anggaran dimana pada Tahun 2013 penyerapan anggaran sebesar **88,70%**, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penyerapan anggaran sebesar **88.78%**. Terkait penyerapan anggaran pada tahun 2014 sebesar 88.78% disebabkan oleh:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari perjalanan dinas;
2. Tidak terpenuhinya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Sisa anggaran pada belanja gaji sehingga berakibat anggaran tersebut dikembalikan kepada kas negara.

| PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI | 91.387.216.000,- | 80.867.967.911,- | 88.49% |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan | 2.580.500.000,- | 2.570.935.150,- | 99.63% |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI | 23.075.833.000,- | 20.472.469.176,- | 88.78% |
| JUMLAH | 117.043.549.000,- | 103.911.372.237.000,- | 88.78% |



Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ANRI berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Penetapan Kinerja ANRI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Rencana Strategis (Renstra) ANRI Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2014 menampilkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum Arsip Nasional RI telah dapat memenuhi atau sesuai rencana dengan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak seluruh target kinerja dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan. Tidak terealisasinya

target kinerja dalam rangka meningkatkan pembinaan kegiatan kearsipan secara nasional, tidak hanya disebabkan ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan, namun juga diperlukan komitmen, partisipasi dan dukungan aktif dari segenap komponen baik instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta pihak swasta dan perorangan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja ANRI sangat diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga pembangunan di bidang kearsipan akan lebih dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Dukungan dari berbagai pihak harus dapat dilaksanakan secara nyata, tidak hanya merupakan gambaran atau cita-cita semata yang hanya merupakan wacana dan pergulatan pemikiran semata, sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN YANG AKAN DILAKSANAKAN ANRI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi dala penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*;

3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi.
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan,
5. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di bidang kearsipan, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu melakukan koordinasi, peningkatan kerjasama

serta membangun sinergi dengan berbagai pihak baik instansi di pusat, di daerah, pihak swasta dan perorangan.

Arsip Nasional RI



**PENETAPAN KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|-------------------|---|-----------------|
| Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya | | | | |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif | 1. | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | 15% |
| | | 2. | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | 15% |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik | 1. | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | 50% |
| | | 2. | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun | 25% |
| Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu | | | | |
| 1 | Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan | 1. | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | 10% |
| Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI | | | | |
| 1 | Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang | 1. | Skor Lakip ANRI | Nilai B (66-75) |
| | | 2. | Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | WTP |

| TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--------|
| | profesional, transparan dan akuntabel | 3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 100% |

**PENGUKURAN/CAPAIAN KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN (%) |
|-------------------|---|-----------------|--|----------------|
| 1 | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | 15% | 30 instansi | 98 |
| 2 | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | 15% | 14 instansi | 100 |
| 3. | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | 50% | Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip perbatasan, | 110 |
| 4. | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun | 25% | 75 instansi | 154 |
| 5. | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | 10% | 11 simpul (1990 data) | 100 |
| 6. | Skor Lakip ANRI | Nilai B (66-75) | Nilai B (66.31) | 100 |
| 7. | Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN (%) |
|--|--------|---|----------------|
| 8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 100% | interkoneksi jaringan, rehabilitasi sistem dan jaringan, tersedianya peralatan pengolah data, peralatan dan mesin | 100 |

**DAFTAR INSTANSI
YANG TELAH DILAKUKAN IMPLEMENTASI SIKD-TIK
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| NO | INSTANSI |
|----|---|
| 1 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) |
| 2 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI |
| 3 | Kementerian Lingkungan Hidup RI |
| 4 | PT. Jasa Raharja |
| 5 | PT. POS Indonesia (Persero) |
| 6 | PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Semarang |
| 7 | PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar |
| 8 | PT. Pengembangan Pariwisata Bali |
| 9 | Badan Pusat Statistik |
| 10 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
| 11 | Lembaga Kebijakan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
| 12 | Kementerian Sosial RI |
| 13 | BP Batam |
| 14 | Universitas Sriwijaya |
| 15 | Universitas Trunojoyo |
| 16 | Provinsi Aceh |
| 17 | Provinsi Sumatera Utara |
| 18 | Provinsi Sumatera Barat |
| 19 | Provinsi Riau |
| 20 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 21 | Provinsi Bengkulu |
| 22 | Provinsi Banten |
| 23 | Provinsi DKI Jakarta |
| 24 | Provinsi Jawa Timur |
| 25 | Provinsi Jawa Tengah |
| 26 | Provinsi Kalimantan Barat |
| 27 | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 28 | Provinsi Gorontalo |
| 29 | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 30 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 31 | Universitas Udayana |
| 32 | Kementerian Luar Negeri RI |

INSTANSI PUSAT YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI KAIDAH KEARSIPAN

| NO | INSTANSI |
|-----------|---|
| 1 | YPAI AL Azhar |
| 2 | PB. Nahdatul Ulama |
| 3 | PT. Timah (Persero) |
| 4 | PT. Semen Baturaja (Persero) |
| 5 | PT. Jasa Tirta I (Persero) |
| 6 | DPP Partai Amanat Nasional |
| 7 | DPP Golongan Karya |
| 8 | PT. Pertamina (Persero) |
| 9 | PT. Taspen (Persero) |
| 10 | PT. Semen Padang (Persero) |
| 11 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 12 | PT. Pharos (Persero) |
| 13 | PT. Perkebunan Nusantara VII- Lampung |
| 14 | PT. Semen Bosowa (Persero) |

**DAFTAR INSTANSI YANG MENYERAHKAN ARSIP STATIS
PADA TAHUN 2014**

| No | INSTANSI | JENIS ARSIP | JUMLAH |
|----|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Kementerian Kehutanan | - Batas Hutan Timor - Kelembagaan | 47 Box |
| 2 | Kementerian Hukum dan HAM | - Peraturan Undang-Undang - Komisi HAM | 11 Box |
| 3 | Kementerian Perumahan Rakyat | Pengembangan perumahan, perumahan swadaya, perumahan formal | 30 Box |
| 4 | Kementerian Sekretariat Negara | Pidato Ibu Tin Soeharto | 41 Box |
| 5 | Sekretariat Kabinet | - KEPRES - Penetapan Golongan IV/c keatas | 650 Box |
| 6 | Kementerian Keuangan | - Nota Keuangan dan RAPBN - SK Menteri 1968 - 2011 | 9 Box, 225 berkas |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | - Ditjen Multilateral - Amerop : Eropa Timur, Eropa Tengah - Arsip Keuangan | 1 Box |
| 8 | BAWASLU | - MOU dengan berbagai lembaga - Sejarah pengawasan pemilu - Laporan akhir tahun 2013 | 3 Box |
| 9 | DKPP | - Putusan perkara KPU - Pelantikan anggota DKPP | 1 Box |
| 10 | Badan Pelaksana BPLS | Perencanaan hokum ortala | 6 Box |
| 11 | ANRI | - MOU ANRI dengan NAM - Notulen rapat sejarah lisan - Berkas kumpulan synopsis - Laporan keuangan | 2 Box |
| 12 | LIPI | Kebun Raya Cibodas | 1 Box |
| 13 | BATAN | Nuklir di bidang pertanian, peternakan, dan sejarah organisasi BATAN | 13 Berkas |
| | | | 3 Film Dokumenter |
| | | | Total: 4 Box |
| 14 | BPKP | - Laporan hasil pengawasan - LAKIP - Kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Delegasi Luar Negeri | 2 Box |

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|--|
| | | - MOU dengan Menteri | |
| 15 | MKRI | - PHPU - PUU | 524 Box |
| 16 | BIG | - Peta perbatasan Indonesia – Singapura | 4 Box |
| | | | 9 Jilid |
| | | - Atlas actual (peta Braille) | 2 Peta |
| | | - MOU | |
| 17 | Lemhanas | Buku merah tentang G30SPKI, Gerwani | 70 Box |
| 18 | KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal | Arsip Pilpres Tahun 2009 | 1 Box |
| | | Arsip Pileg Tahun 2009 | |
| 19 | Dewan Pertimbangan Presiden | Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama, dll | 4 Box |
| 20 | Kementerian Pendidikan dan kebudayaan | Penyerahan arsip sertifikat pengakuan lembaga internasional UNESCO PBB berupa sertifikat pengakuan Tari Saman dan Noken Papua | 2 Sertifikat |
| 21 | Kementerian Luar Negeri RI | Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama dll | 1 Box |
| 22 | Kementerian Kesehatan RI | Surat Pengunduran diri menteri Endang, berkan memori masukan DPR-RI dari Kementerian Kesehatan | 4 Berkas |
| 23 | BPLS Sidoarjo | Laporan penting kejadian meletus dan foto citra satelit secara kronologis | 55 Berkas |
| 24 | Otorita Asahan | Contract kerja dengan jepang dan berbagai kegiatan power station bundungan | 69 Box |
| 25 | Sekretariat Kabinet | Kenaikan pangkat golongan gol IVc Keatas dan peraturan undang- undang 2007-2012 | 81 dan 357 box |
| 26 | Sekretariat Militer Presiden/Sekneg | Memorial Presiden SBY | 500 Jilid |
| 27 | ANRI | Undang-undang dan perencanaan | 14 box |
| JUMLAH | | | 1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat |

PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP TAHUN 2014

| NO | NOMOR | URAIAN ISI INFORMASI | INSTANSI |
|----|------------------|--|---|
| 1 | PK.03.09/63/2014 | JRA fasilitas non keuangan dan non kepegawaian PDAM | Kabupaten Gianyar |
| 2 | PK.03.09/62/2014 | JRA fasilitatif bidang keuangan, kepegawaian ASN dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | MPR RI |
| 3 | PK.03.09/61/2014 | JRA substantif | Dirjen Anggaran dan Badan Kebijakan Kiskal Kementerian Keuangan |
| 4 | PK.03.09/60/2014 | JRA substantif | Kementerian Perhubungan |
| 5 | PK.03.09/59/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Pemerintah Kabupaten Purworejo |
| 6 | PK.03.09/58/2014 | JRA fasilitatif keuangan dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |
| 7 | PK.03.09/57/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara, serta fasilitatif keuangan | Pemerintah Kabupaten Pohuwato |
| 8 | PK.03.09/56/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara, serta fasilitatif keuangan | Pemerintah Kabupaten Boalemo |
| 9 | PK.03.09/55/2014 | JRA fasilitatif keuangan | Pemerintah Kabupaten Solok |
| 10 | PK.03.09/54/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara | Pemerintah Kabupaten Sambas |
| 11 | PK.03.09/53/2014 | persetujuan JRA fasilitatif kepegawaian | Provinsi Banten |
| 12 | PK.03.09/52/2014 | persetujuan JRA keuangan kabupaten magelang | |
| 13 | PK.03.09/51/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara dan fasilitatif keuangan PDAM | Kabupaten Gianyar |
| 14 | PK.03.09/50/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Pemerintah Provinsi Jambi |
| 15 | PK.03.09/49/2014 | JRA fasilitatif keuangan | Pemerintah Aceh |
| 16 | PK.03.09/48/2014 | JRA fasilitatif keuangan dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara | Pemerintah Kabupaten Berau |
| 17 | PK.03.09/47/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian pemerintah | Kabupaten Magetan |

| NO | NOMOR | URAIAN ISI INFORMASI | INSTANSI |
|----|------------------|--|---|
| 18 | PK.03.09/46/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian dan keuangan | Poltek Negeri Semarang |
| 19 | PK.03.09/45/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian pegawai ASN dan pejabat negara | Pemerintah Kabupaten Bangli |
| 20 | PK.03.09/44/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara, serta JRA fasilitatif keuangan | Pemerintah Provinsi Gorontalo |
| 21 | PK.03.09/43/2014 | JRA fasilitatif keuangan serta fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara | Pemerintah Kota Balikpapan |
| 22 | PK.03.09/42/2014 | JRA fasilitatif keuangan | Pemkab Murung Raya |
| 23 | PK.03.09/41/2014 | JRA substantif | Dirjen Pajak Kementerian Keuangan |
| 24 | PK.03.09/40/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian PNS dan Pejabat Negara, serta fasilitatif keuangan | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur |
| 25 | PK.03.09/39/2014 | JRA fasilitatif keuangan | Pemerintah Kabupaten Nunukan |
| 26 | PK.03.09/37/2014 | JRA fasilitatif asn dan pejabat negara dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Kabupaten Belitung |
| 27 | PK.03.09/36/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Pemerintah Kabupaten Wajo |
| 28 | PK.03.09/35/2014 | JRA fasilitatif bidang keuangan, kepegawaian dan non keuangan dan non kepegawaian | |
| 29 | PK.03.09/34/2014 | JRA Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Keuangan | Pemerintah Kota Gorontalo |
| 30 | PK.03.09/33/2014 | JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian ASN dan Pegawai Negara | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |
| 31 | PK.03.09/32/2014 | JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah | Kabupaten Bantul |
| 32 | PK.03.09/31/2014 | JRA Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara | Pemerintah Kabupaten Bulungan |
| 33 | PK.03.09/28/2014 | Persetujuan JRA Fasilitatif Bidang Keuangan | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI |
| 34 | PK.03.09/27/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan keuangan | BMKG |
| 35 | PK.03.09/26/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara | Kemenko Bidang Polhukam |
| 36 | PK.03.09/25/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Kementerian Pertahanan |
| 37 | PK.03.09/24/2014 | JRA substantif KemenPAN dan RB | |

| NO | NOMOR | URAIAN ISI INFORMASI | INSTANSI |
|----|------------------|---|---|
| 38 | PK.03.09/23/2014 | JRA substantif dan fasilitatif kepegawaian ASN dan pejabat negara | Ombudsman RI |
| 39 | PK.03.09/22/2014 | JRA fasilitatif kepegawaian, keuangan non keuangan dan non kepegawaian dan JRA substantif | Kemenlu RI |
| 40 | PK.03.09/20/2014 | JRA Fasilitatif | Pemkot medan |
| 41 | PK.03.09/19/2014 | JRA Fasilitatif | Kementerian Dalam Negeri |
| 42 | PK.03.09/18/2014 | JRA Keuangan | Kabupaten Paser |
| 43 | PK.03.09/17/2014 | JRA fasilitatif bidang penelitian dan pengembangan | Badan Pertanahan Nasional |
| 44 | PK.03.09/16/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Pemkab Pacitan |
| 45 | PK.03.09/15/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS ,polri dan TNI | |
| 46 | PK.03.09/14/2014 | Persetujuan JRA substantif | Kemenko Kesra |
| 47 | PK.03.09/13/2014 | Persetujuan JRA substantif ketenagalistrikan | Kementerian ESDM |
| 48 | PK.03.09/12/2014 | JRA substantif | Kementerian Kehutanan |
| 49 | PK.03.09/11/2014 | Persetujuan JRA substantif | BNPB |
| 50 | PK.03.09/10/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara | Pemkab Sijunjung |
| 51 | PK.03.09/09/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara | Pemkab Cianjur |
| 52 | PK.03.09/08/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara | Pemkab Bangka Selatan |
| 53 | PK.03.09/07/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara | Pemkab Sleman |
| 54 | PK.03.09/06/2014 | Persetujuan JRA fasilitatif Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara | Pemkab Solok |
| 55 | PK.03.09/05/2014 | JRA Substantif dan Fasilitatif | BAWASLU dan DKPP |
| 56 | PK.03.09/04/2014 | Permohonan persetujuan JRA kepegawaian, keuangan, fasilitatif non keuangandan non kepegawaian dan JRA | Universitas Semarang |
| 57 | PK.03.09/03/2014 | JRA fasilitatif dan Substantif | PPATK |
| 58 | PK.03.09/02/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian JRA kepegawaian, JRA keuangan dan JRA substantif | BPN |
| 59 | PK.03.09/01/2014 | JRA fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP

| NO | INSTANSI (JENIS INFORMASI) |
|----|--|
| 1 | PT.Timah Jakarta |
| 2 | PT Angkasa Pura I kantor kantor pusat |
| 3 | Kementerian Kehutanan |
| 4 | KPPBC tipe B Batam |
| 5 | Kementerian Keuangan |
| 6 | Kementerian Pertanian |
| 7 | KPP Pratama Jakarta Menteng Satu |
| 8 | Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI |
| 9 | KPPN Bukittinggi |
| 10 | Kantor pusat DJBC |
| 11 | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI |
| 12 | KPPN Baturaja |
| 13 | Kabupaten Bandung |
| 14 | PT Angkasa Pura I |
| 15 | Kementerian Pertahanan dan TNI |
| 16 | Kementerian Perindustrian RI |
| 17 | Kabupaten Belitung Timur (arsip logistiks eks pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009) |
| 18 | Kabupaten Kepahiang (arsip eks pemilu tahun 2009) |
| 19 | Eks pemilukada Kabupaten Pati (persetujuan pemusnahan arsip eks pemilu tahun 2009) |
| 20 | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Provinsi Sulawesi Tengah |
| 21 | Eks Bagian Keuangan Setwilda tingkat II Purworejo (arsip keuangan) |
| 22 | KPPN Gorontalo |
| 23 | PPA Pemkot Medan |
| 24 | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 25 | PPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| 26 | Lembaga Admistrasi Negara RI |
| 27 | KPPBC TMP B Jambi |
| 28 | KPPBC TMP Merak |
| 29 | Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat |
| 30 | KPPN Pekanbaru |
| 31 | BKN (arsip kepegawaian) |
| 32 | KPPBC TMP A Bekasi |
| 33 | Badan Pusat Statistik |
| 34 | PDAM Kabupaten Ngawi |
| 35 | Unit Kearsipan II (Itjen) Kementerian Perindustrian |
| 36 | Pemerintah Daerah Provinsi Bali |
| 37 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 38 | LAPAN |
| 39 | Kanwil DJP Jakarta khusus |
| 40 | Kementerian Keuangan (Purwakarta) |
| 41 | Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin |
| 42 | PPA DJBC Bali, NTB dan NTT |
| 43 | PPA KPU Kab. Landak |
| 44 | PPA KPPN Kotabaru |

| NO | INSTANSI (JENIS INFORMASI) |
|----|---|
| 45 | PPA KPP Pratama Jakarta Jatinegara |
| 46 | Persetujuan Pemusnahan Arsip BPS |
| 47 | PPA Kementerian Perhubungan RI |
| 48 | PPA Kementerian Sekretariat Negara RI |
| 49 | PPA KPPBC TMP B Samarinda |
| 50 | KPPBC TMP Tanjung Emas |
| 51 | PPA KPU provinsi kepulauan Bangka Belitung |
| 52 | PPA KPU kabupaten Gowa |
| 53 | Eks Kanwil Departemen Penerangan dan Eks BP 7 Provinsi Sumatera BARat |
| 54 | Arsip Universitas Airlangga |
| 55 | PPA dokumen PT Bukit Asam |
| 56 | PPA KPKNL Purwokerto |
| 57 | KPPBC Sibolga |
| 58 | Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak |
| 59 | Kemenkeu RI |
| 60 | BPJS jakarta |
| 61 | Persetujuan pemusnahan Arsip kemenlu RI |
| 62 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 63 | Kabupaten Badung |
| 64 | Dirjen BPDAS PS |
| 65 | Badan linformasi Geospacial |
| 66 | Dirjen perbendaharaan provinsi Jawa Barat |
| 67 | KPP PMA Satu |
| 68 | KPPBC TMP C Lhokseumawe |
| 69 | KPPN Gunung sitoli |
| 70 | KPU Kab Ciamis |
| 71 | KPP Madya Sidoarjo |
| 72 | Persetujuan pemusnahan arsip KPPN II Medan |
| 73 | Pertimbangan Pemusnahan Arsip PT Angkasa Pura I |
| 74 | Eks. Kanwil Departemen Penerangan dan Eks. BP 7 Provinsi Sumatera Barat |
| 75 | Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo |

**REALISASI ANGGARAN TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | REALISASI (%) | |
|---|--|---|--------------------|---------------|----|
| Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya | | | | | |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | 2,208,296,000 | 2,155,691,600 | 98 |
| | | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | 751,052,000 | 725,341,000 | 97 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | 1,519,172,000 | 1,470,860,800 | 97 |
| | | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun | 609,372,000 | 602,024,200 | 99 |
| Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu | | | | | |

| TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | REALISASI (%) |
|---|---|---|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | 1,607,683,000 | 1,560,649,200 | 98 |
| Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI | | | | | |
| 1 | Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel | Skor Lakip ANRI | 1,542,170,000 | 1,536,213,600 | 100 |
| | | Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | 383,760,000 | 364,434,600 | 95 |
| | | Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 2,580,500,000 | 2,570,935,150 | 100 |

**PENYELAMATAN ARSIP STATIS LEMBAGA NEGARA
TAHUN 2014**

| No | Nama Instansi | Jenis Arsip | Jumlah |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | Kementerian Kehutanan | - Batas Hutan Timor Timur - Kelembagaan | 47 Box |
| 2 | Kementerian Hukum dan HAM | - Peraturan Undang-Undang - Komisi HAM | 11 Box |
| 3 | Kementerian Perumahan Rakyat | Pengembangan perumahan, perumahan swadaya, perumahan formal | 30 Box |
| 4 | Kementerian Sekretariat Negara | Pidato Ibu Tin Soeharto | 41 Box |
| 5 | Sekretariat Kabinet | - KEPRES Penetapan Golongan IV/c keatas | 650 Box |
| 6 | Kementerian Keuangan | - Nota Keuangan dan RAPBN - SK Menteri 1968 – 2011 | 9 Box, 225 berkas |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | - Ditjen Multilateral - Amerop : Eropa Timur, Eropa Tengah - Arsip Keuangan | 1 Box |
| 8 | BAWASLU | - MOU dengan berbagai lembaga - Sejarah pengawasan pemilu - Laporan akhir tahun 2013 | 3 Box |
| 9 | DKPP | - Putusan perkara KPU - Pelantikan anggota DKPP | 1 Box |
| 10 | Badan Pelaksana BPLS | Perencanaan hokum ortala | 6 Box |
| 11 | ANRI | - MOU ANRI dengan NAM - Notulen rapat sejarah lisan - kumpulan synopsis - Laporan keuangan | 2 Box |
| 12 | LIPI | Kebun Raya Cibodas | 1 Box |
| 13 | BATAN | Nuklir di bidang pertanian, peternakan, dan sejarah organisasi BATAN | 13 Berkas 3 Film Dokumenter Total: 4 Box |
| 14 | BPKP | - Laporan hasil pengawasan - LAKIP - Kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Delegasi Luar Negeri - MOU dengan Menteri | 2 Box |
| 15 | MKRI | - PHPU - PUU | 524 Box |
| 16 | BIG | - Petaperbatasan Indonesia – Singapura - Atlas actual (peta Braille) - MOU | 4 Box, 9 jilid 2 Peta |
| 17 | Lemhanas | Buku merah tentang G30SPKI, Gerwani | 70 Box |
| 18 | KPU Provinsi Kepulauan Riau | Arsip Pilpres Tahun 2009 Arsip Pileg Tahun 2009 | 1 Box |

| No | Nama Instansi | Jenis Arsip | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 19 | Dewan Pertimbangan Presiden | Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, agama dll | 4 Box |
| 20 | Kementerian Pendidikan dan kebudayaan | Penyerahan arsip sertifikat pengakuan lembaga internasional UNESCO PBB berupa sertifikat pengakuan Tari Saman dan Noken Papua | 2 Sertifikat |
| 21 | Kementerian Luar Negeri RI | Surat pertimbangan kepada Presiden bidang politik, hukum, kebudayaan, | 1 Box |
| 22 | Kementerian Kesehatan RI | Surat Pengunduran diri menteri Endang, berkan memori masukan DPR-RI dari Kementerian Kesehatan | 4 Berkas |
| 23 | BPLS Sidoarjo | Laporan penting kejadian meletus dan foto citra satelit secara kronologis | 55 Berkas |
| 24 | Otorita Asahan | Contract kerja dengan jepang dan berbagai kegiatan power station bendungan | 69 Box |
| 25 | Sekretariat Kabinet | Kenaikan pangkat golongan gol IVc Keatas dan peraturan undang-undang 2007-2012 | 81 dan 357 box |
| 26 | Sekretariat Militer Presiden/Sekneg | Memorial Presiden SBY | 500 Jilid |
| 27 | ANRI | Undang-undang dan perencanaan | 14 box |
| JUMLAH | | | 1933 box, 297 berkas, 509 jilid, 2 peta, 3 film, dan 2 sertifikat |

**PENYELAMATAN ARSIP STATIS (NON LEMBAGA NEGARA)
TAHUN 2014**

| NO | KETERANGAN | INSTITUSI/JUMLAH |
|----|---|---|
| 1 | Arsip perusahaan | PT. Askes (22 boks arsip), Balai Pustaka (1 boks arsip), PT. Taspen (14 boks arsip), PT. Pelindo III Surabaya (22 boks arsip), PT. Angkasa Pura I (20 boks arsip) |
| 2 | Arsip Ormas/Orpol | PBNU (15 boks), PMI (25 boks), PP Muhammadiyah (11 boks), Partai Golongan Karya, |
| 3 | Arsip perorangan (tokoh nasional/pelaku sejarah) | Pandam Guritno, Kris Biantoro, Henk Ngantung |
| 4 | Wawancara dengan kerabat kerajaan serta tokoh pembentukan dan pemekaran wilayah serta konflik di daerah | 30 kaset |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET |
|-------------------|---|-------------------|---|--|---|-------------|-----|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif | 1. | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | 15% | 32 instansi | 103 | |
| | | 2. | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | 15% | 14 | 94 | |
| 1 | Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik | 1. | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | 50% | Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip Perbatasan | 110 | |
| | | 2. | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun | 25% | 77 instansi | 154 | |
| 2 | Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan | 1. | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | 10% | 11 simpul (1990 data) | 100 | |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET |
|------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|
| 3 | Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel | 1. Skor Lakip ANRI | Nilai B (66-75) | B (66.31) | 100 | |
| | | 2. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | 100 | |
| | | 3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 100% | Terpenuhinya sarana dan prasarana | 100 | |
| CAPAIAN SASARAN | | | | | 107.625 | |

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PPK)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|------------------|---|-----|--|
| Penyelenggaraan Kearsipan Nasional | 1. | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | Input : Dana, SDM | Rp 2,208,296,000 | Rp 2,155,691,600 | 98 | |
| | | | Output: implementasi SIKD | 30 instansi | 32 instansi | 103 | |
| | | | Outcomes: | 15% | 32 Instansi | 103 | |
| | 2. | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | Input : Dana, SDM | Rp 751,052,000 | Rp 725,341,000 | 97 | |
| | | | Output: | 15 instansi | 14 instansi | 98 | |
| | | | Outcomes: | 15% | 14 instansi | 98 | |
| Terwujudnya efektivitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik | 1. | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | Input : Dana, SDM | Rp 1,519,172,000 | Rp 1,470,860,800 | 97 | |
| | | | Output: | 25 instansi | 27 instansi | 110 | |
| | | | Outcomes: | 50% | Arsip Pemilu, Arsip KIB, Arsip perbatasan | 110 | |
| | 2. | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan | Input : Dana, SDM | Rp 609,372,000 | 602,024,200 | 99 | |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET |
|---|-------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | pemusnahan arsip per tahun | | | | |
| | | | Output: | 50 instansi | 77 instansi | 154 |
| | | | Outcomes: | 25% | 77 instansi | 154 |
| Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas serta peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan | 1. | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | Input : Dana, SDM | Rp 1,607,683,000 | Rp 1,560,649,200 | 98 |
| | | | Output: | 11 simpul | 11 simpul | 100 |
| | | | Outcomes: | 10% | 11 simpul (1990 data) | 100 |
| Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel | 1. | Skor Lakip ANRI | Input : Dana, SDM | Rp 1,542,170,000 | Rp 1,536,213,600 | 100 |
| | | | Output: | 1 Laporan AKIP | 1 Laporan | 100 |
| | | | Outcomes: | Nilai B (66-75) | B (66.31) | 100 |
| | 2. | Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | Input : Dana, SDM | Rp 383,760,000 | Rp 364,434,600 | 95 |
| | | | Output: | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|
| | | Outcomes: | WTP | WTP | 100 | |
| | 3. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | Input : Dana, SDM | Rp 2,580,500,000 | Rp 2,570,935,150 | 100 | |
| | | Output: | 5 pengadaan sarana prasarana | 5 dokumen100 | 100 | |
| | | Outcomes: | 100% | Terpenuhinya sarana dan prasarana | 100 | |
| JUMLAH | | Input | Rp 11,202,005,000 | 10,986,150,150 | 98 | |
| | | Output | 99.50% | | | |
| | | Outcomes: | 107% | | | |

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | INDEKS EFISIENSI | STANDAR EFISIENSI | KATEGORI | TINGKAT EFISIENSI |
|--|---|---|--------|------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif | Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; | 98 | 103 | 1 | 1 | Efisien | 0 |
| | Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip | 97 | 94 | 1 | 1 | Efisien | 0 |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | INDEKS EFISIENSI | STANDAR EFISIENSI | KATEGORI | TINGKAT EFISIENSI |
|--|---|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik | Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan | 97 | 110 | 1 | 1 | Efisien | 0 |
| | Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun | 99 | 154 | 2 | 1 | Efisien | 1 |
| Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis teknologi dan informasi (TIK) secara komprehensif dan terpadu | Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN | 98 | 100 | 1 | 1 | Efisien | 0 |
| Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI | Skor Lakip ANRI | 100 | 100 | 1 | 1 | Efisien | 0 |
| | Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan | 95 | 100 | 1 | 1 | Efisien | 0 |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | INDEKS EFISIENSI | STANDAR EFISIENSI | KATEGORI | TINGKAT EFISIENSI |
|---------|---|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip | 100 | 100 | 1 | 1 | Efisen | 0 |